

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN
ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
LUMAJANG
(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum Perdata Islam

Oleh:

Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM. C71214073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM : C71214073
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak
Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang
(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM. C71214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Em Bagus Sulthonil Auliya NIM. C71214073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018
Pembimbing,



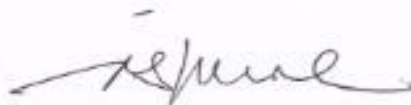
H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Em Bagus Sulthonil Auliya NIM. C71214074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II



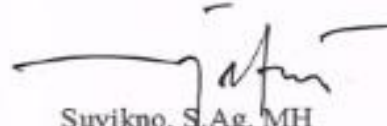
Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III



H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd, I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Suvikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 14 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana Posedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ?. *Kedua*, bagaimana analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak ?.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, kemudian dianalisis dengan hukum hukum positif dan menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ketika berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan perlindungan anak. Masalah perlindungan anak tentunya haruslah banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga anak dapat merasakan hak-haknya. Pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya ketika mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, maka akan sedikit memperlambat proses anak tersebut dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 telah memberikan ruang lebih cepat bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-sulnya untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai salah satu alat bukti identitas baginya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terus mensosialisasikan prosedur pencatatan kelahiran tersebut kepada seluruh penduduk Kabupaten Lumajang agar anak yang tidak diketahui asal-usulnya dapat memiliki akta kelahiran.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	22
A. Pengertian Anak Perspektif Perundang-Undangan	22
B. Pencatatan Kelahiran	32
1. Pengertian Pencatatan Kelahiran	32
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran	40
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran	42

BAB III PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI	
ASAL-USULNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN	
SIPIL KABUPATEN LUMAJANG.....	44
A. Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang	44
B. Kasus Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-	
usulnya	48
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran.....	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN	
ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA.....	55
A. Analisis Yuridis Prosedur Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak	
Diketahui Asal-Usulnya Yang Diimplementasikan Oleh Dinas	
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Dasarnya. Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum. Negara ini adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten.

[illegible]

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, diatur dalam peraturan presiden republik indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Yang dimaksud dengan instansi dalam pasal tersebut ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.⁶

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2009, yang menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

⁶ Lihat pasal 51 ayat (1) Peraturan presiden No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan penacatatan sipil.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2) jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Jadi, dalam hal ini termasuk juga tentang identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian Didalam berbagai Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tentang HAM maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tannggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintah dalam negara hukum tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja namun lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

asal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun dalam permendagri tersebut terlihat kurang jelas tentang pencatatan bagi anak yang asal usulnya tidak jelas tersebut. Karena dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.¹¹ Dalam hal ini, terdapat sedikit ketimpangan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Dalam membuat akta kelahiran anak yang asal-susulnya tidak jelas harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau melalui prosedur yang telah ada dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Jadi dalam hal melakukan pencatatan kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya masyarakat hanya akan melewati beberapa prosedur saja yang cukup singkat karena aturan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Namun aturan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini dirasa sudah melewati batas wewenang dari pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun

¹⁰ Lihat pasal 3 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akata Kelahiran.

¹¹ Lihat pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya menurut hukum positif.
2. Perlindungan hukum bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
3. Prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
4. Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ?
2. Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

Kedua, Tengku Apriara Dian Prasetya (skripsi 2012). Skripsi ini berjudul “Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mutu pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam kategori (B) atau baik

¹³ Haryono, “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten” (Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Ketiga, Wati Udia (skripsi 2012). Skripsi ini berjudul “Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dirasa kurang menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat kabupaten Jombang melalui program dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran yang belum mempunyai akta kelahiran anak sah maupun anak luar kawin.¹⁵

Dengan adanya kajian pustaka di atas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada prosedur pencatatan kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya terhadap perlindungan anak.

¹⁵ Wati Udia, "Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Lar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang" (Skripsi--Universitas Negeri Malang, Malang, 2011).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

pengkajian dari permasalahan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik bagi pembaca terlebih bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam keperdataan, khususnya dalam prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu *“Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

[illegible]

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, dan
Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran.

Pencatatan kelahiran anak
yang asal-usulnya tidak jelas
menurut pasal 55 Undang-
Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan : pasal 55 ini menjelaskan bahwa pembuktian seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta yang autentik. Apabila akta autentik tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan. Atas dasar penetapan Pengadilan tersebut, maka instansi baru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut.

Anak yang tidak diketahui

asal-usulnya : anak golongan ini termasuk juga bagi anak terlantar dan anak temuan.

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulannya, dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.¹⁶ Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

[illegible]

1) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumentasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cct. 3* (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.

[illegible]

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.²⁰ Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Responden informan, yaitu dengan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dan Kabag Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan dengan teknik deskriptif dan deduktif.

a. Analisis deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

[illegible]

Bab empat analisis data tentang kasus pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan hukum positif yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

[illegible]

A. Pengertian Anak Perspektif Perundang-Undangan

22

Anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir tapi bayi yang masih di dalam kandunganpun juga wajib dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak maka wajib melindungi bayi sampai ia dewasa nanti. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.² Dalam Pasal 1 Ayat (6) juga menjelaskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”³

³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam Undang-Undang tersebut meliputi :⁴

1. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa :

[illegible]

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
5. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa :
 - a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa :
 - a. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
 - b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

- [illegible]

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
15. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
16. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵ Muhammad Idris Ramulyo menjabarkan maksud dari pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah yakni :⁶

⁵ Lihat Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 158-149.

- Dari ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).⁸ Meskipun terhadap anak yang lahir itu telah mendapat pengakuan dari ayah ibunya, akan tetapi status anak itu belum dapat dikatakan anak itu anak sah. Karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian agar anak yang dilahirkan ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya maka peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang dalam melakukan pengakuan terhadap kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 103.

telah mendapat pengesahan, maka status hukum atau kedudukan anak tersebut menjadi sama dengan anak sah lainnya dalam segala hal.

Dalam hal pengakuan anak ataupun pengesahan anak dituangkan dalam suatu dokumen otentik yang dibuat oleh catatan sipil yang pada prinsipnya lebih ditujukan untuk maksud menciptakan hubungan hukum perdata antara anak yang diakui dengan sipelaku. Sedangkan akta pengesahan anak adalah semacam pernyataan bahwa anak tersebut telah disahkan menjadi anak yang sah, dalam pengertian hukum perdata. Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya dibidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya, maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ini ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification*) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹³ bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kemudian menurut A. Pitlo mengartikan akta

¹³ Sudikno Mertokusuma, *Hukum acara perdata di indonesia* (yogyakarta: penerbit Liberty, 2002), 106.

itu sebagai surat-surat yang ditanda tangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴

Berangkat dari definisi tersebut, maka jelaslah tidak semua surat disebut akta. Melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pulalah bisa disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat disebut akta adalah :

a. Surat itu harus ditandatangani.

Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi “suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termasuk diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik. Namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda tangani oleh pihak”.

Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika ditandatangani oleh yang membuatnya maka surat itu bukanlah akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian dapat disebut akta. Tanda tangan jelas memiliki ciri dari setiap orang yang tidak mungkin sama dengan orang lain.

¹⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemah M. Isa Arif (Jakarta: PT Intermasa, 1978), 52.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan.

Sesuai dengan perntukannya suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siap yang bersangkutan dengan akta itu. Maka jelas harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dinutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Jika surat sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat tersebut tidak bisa disebut akta.

- c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti.

Agar suatu surat dapat disebut akta, surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian. Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Di antara keduanya terdapat daerah kesangsian (Terrein Van het dubin).¹⁵

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri

¹⁵ A. Pitlo, *Op. Cit*, 53.

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

¹⁶ Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi.¹⁷

Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat jenis yakni :¹⁸

a. Akta kelahiran umum.

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perUndang-Undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b. Akta kelahiran istimewa.

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Batas waktu yang dilampau adalah lebih 60 hari.

c. Akta kelahiran luar biasa.

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

¹⁷ Hertutik *Wawancara*, Lumajang 25 Juni 2018.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 42-43.

a. Bagi Pribadi/individu:

- 1) Menentukan status hukum seseorang.
- 2) Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim.
- 3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

- 1) Meningkatkan tertib administrasi Negara.
- 2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.
- 3) Pengawasan dan pengendalian.

[illegible]

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam
pengurusan akta kelahiran dikemukakan berikut ini:²¹

- ²⁰ <https://legiantengah.wordpress.com/info.../informasio-pelayanan-akta-manfaat> diakses tanggal 28 Juni 2018

[illegible]

Syarat huruf a, b, c, e, dan g berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan huruf d dan huruf f. Akta kelahiran telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Namun berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua.

Bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka dalam pencatatan kelahirannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) yakni:²²

- 1) Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- 2) Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab.

Pencatatan Kelahiran Penduduk warga negara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 yakni dengan tata cara:²³

²² Lihat Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

²³ Lihat Pasal 53 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dasar hukum dalam Perundang-Undangan untuk melakukan pencatatan kelahiran ini adalah :

- [illegible]

BAB III

A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang atau yang biasanya di sebut DISPENDUKAPIL Kabupaten Lumajang adalah suatu instansi yang menangani tentang pencatatan Kependudukan, diantaranya adalah melayani pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pencatatan perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil, dan penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Instansi yang berada dalam naungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang, dimana administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk penataan kependudukan guna mewujudkan administrasi yang tertib dan jujur.

1. Visi: Tertibnya Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas dan Bermartabat
2. Misi: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan”

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

² Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Dalam kasus yang dialami oleh pemohon tersebut. Anak tersebut merupakan seorang anak yang tidak memiliki data kelahiran, yang kedua adalah seorang anak tersebut merupakan seorang anak yang terlantar.⁶ Pemohon ketika itu disarankan untuk membuat penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat menetapkan asal-usul anak untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam

⁶ Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *Wawancara*, Lumajang 25 Juni 2018.

1. Penelitian berkas;
2. Memasukkan Data dalam Komputer;
3. Pengecekan Data dan diparaf oleh Pemeriksa Data;
4. Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Distempel atau dicap ;
6. Penyerahan Akta Kelahiran pada pemohon.

Biaya pembuatan Akta Kelahiran secara resmi gratis. Pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lewat dari 60 hari dikenakan denda maksimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta semua data sesuai, maka pengurusan dapat selesai dalam jangka

[illegible]

waktu 2 hari.Sedangkan penyelesaian pembutan akta kelahiran, berdasarkan Undang-Undang adalah selama 30 hari kerja.

Pelaksana pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah:⁸

1. Tahap Administrasi

Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pendaftaran permohonan.

Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah mencatat identitas setiap permohonan yang akan mengurus kepentingannya di bidang Kependudukan dan jenis urusan yang akan diurus oleh masing-masing pemohon. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka yang akan mengurus kepentingannya di bidang kependudukan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya agar dapat mengatur siapa yang harus didahulukan proses pelayanannya. Berdasarkan No. surat pendaftarannya. Setiap urusan kependudukan harus terlebih dulu mendaftarkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang guna untuk menghindari adanya suasana yang tidak tertib, karena banyak warga yang akan mengurus surat akta kelahiran anaknya masing-masing.

Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya kalau ada urusan tertentu dan semakin tua usia penduduknya maka semakin menurun kepemilikan akta kelahirannya karena mereka merasa sudah tidak perlu mengurus akta kelahiran karena sudah tidak

⁸ Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *Wawancara*, Lumajang 25 Juni 2018.

- ### C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran

[illegible]

- ¹¹ Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang yang menjadi objek penelitian dari penulis merupakan salah satu instansi yang berwenang di wilayah teritorial Kabupaten Luamajng dalam melakukan pelayanan terhadap pembuatan akta kelahiran. Dalam melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang telah mengikuti apa yang telah diamanatkan dalam berbagai Perundang-Undangan.

[illegible]

ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuannya dapat dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian dan Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditanda tangani oleh wali/ penggung jawab.

Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak dapat melampirkan surat keterangan kelahiran, maka akan dibuatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran. Lalu pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak dapat melampirkan Akta Nikah kedua orang tua, maka akan dibuatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran pasangan suami istri. Dua SPTJM tersebut haruslah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh dan diketahui oleh dua orang saksi. Saksi dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) adalah orang yang melihat atau mengetahui penanda tangan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tersebut.

Dalam hal perlindungan anak, proses yang dilakukan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran lebih mudah dilakukan dan dilaksanakan. Hal ini karena tidak memakan waktu yang relatif lebih lebih lama seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak-hak keperdataan seorang anak yang tidak diketahui asal-

usulnya tersebut akan lebih lama terpenuhi ketika menalani proses di pengadilan.

Menurut penulis, ketika anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka haruslah ada bukti untuk mengetahui identitas dari anak tersebut. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti untuk membuktikan status seorang anak. Ketika akta kelahiran tidak ada maka akan timbul masalah bagi seorang anak tersebut. Dalam hal ini, untuk mendapatkan akta kelahiran maka diperlukan penetapan asal-usul anak. Tugas dari dinas kependudukan dan catatan sipil adalah mencatat dan tidak dapat menentukan atau menetapkan asal-usul anak, maka dari itu untuk membuktikan kebenaran asal-usul seorang anak haruslah dibuktikan di pengadilan.

Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menawarkan sebuah solusi untuk seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam membuat akta kelahiran. dengan berlakunya Permendagri tersebut dapat mempercepat dan mempermudah para pemohon yang akan melakukan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena para pemohon tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Hak-hak keperdataan bagi seorang anak tersebut juga akan lebih cepat didapatkan dan juga pastinya perlindungan hukum bagi anak tersebut juga akan lebih cepat mendapat kejelasan.

Dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini akan lebih menjamin terhadap perlindungan seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya karena

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, penulis dapat memberikan saran kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam melakukan pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan para pemohon/ pelapor yang ingin melakukan pencatatan kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, S.J. Fockema. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J. B. Wolters uitgeversmaatschappij*. Jakarta: N. V. Groningen, 1951.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Haryono. *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013.
- Herlina, Apong dkk. *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF, 2003.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mertokusuma, Sudikno. *Hukum acara perdata di Indonesia*. yogyakarta: penerbit Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Cet 1*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa, terjemah M. Isa Arif*. Jakarta: PT Intermasa, 1978.
- Prasetya, Tengku Apriara Dian. *Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya*. Surabaya: Skripsi--UPN veteran jawa timur, 2012.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996.
- Ranuhhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- S, Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,
- Siswosoediro, Henry S. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia, 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI-PRESS, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1980.
- Tama, Rusli An. R. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.
- Udia, Wati. *Proses Pencerbitan Akta Kelahiran Anak Lar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang*. Malang: Skripsi--Universitas Negeri Malang, 2011.
- Widyaningsih, Rika Wahyu. *Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg)*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Badan administrasi kepegawaian negara. *kebijakan kepegawaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilu*. Jakarta: tp, 1999.
- Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akata Kelahiran.
- Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Kepmen No.63/KEP/M.PAM/7/2005.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Amir Siswanto, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang *wawancara*, Lumajang 26 juni 2018.
- Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang *Wawancara*, Lumajang 25 Juni 2018.
- <https://legiantengah.wordpress.com/info.../informasio-pelayanan-akta-manfaat> diakses tanggal 28 Juni 2018.